



Rekonstruksi Ekonomi Makro Islam Melalui Pendekatan Konseptual Kebijakan Fiskal dan Tantangan Kelangkaan Sumber Daya

Putri Amirah Hajarani^{1*}, Imsar¹

¹ Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: amirahputri56@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to reconstruct the Islamic macroeconomic paradigm by focusing on fiscal policy and responses to resource scarcity. Using a descriptive qualitative approach based on literature review, the study reveals that fiscal policy in Islam functions not only as a tool for economic stabilization but also as an instrument for equitable distribution and sustainable resource management. Historical analysis of fiscal practices during the Prophet Muhammad's era illustrates a zakat-, kharaj-, and fai-based system managed transparently and justly through baitul mal. In the modern context, challenges such as inequality, resource exploitation, and energy crises require a new approach grounded in maqashid shariah as the foundation of macroeconomic planning. Therefore, reconstructing Islamic macroeconomics is essential to establishing a just, sustainable, and spiritually rooted economic system.*

Keywords: *Islamic Macroeconomics; Fiscal Policy; Scarcity of Resources; Maqashid Shariah; Economic Reconstruction.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma ekonomi makro Islam dengan menitikberatkan pada kebijakan fiskal dan respon terhadap kelangkaan sumber daya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, kajian ini mengungkap bahwa kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya. Analisis historis terhadap praktik kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW menunjukkan sistem fiskal berbasis zakat, kharaj, dan fai yang dikelola melalui baitul mal secara transparan dan berkeadilan. Dalam konteks modern, tantangan seperti ketimpangan distribusi, eksploitasi sumber daya, dan krisis energi menuntut pendekatan baru yang menjadikan maqashid syariah sebagai fondasi perencanaan makroekonomi. Dengan demikian, rekonstruksi ekonomi makro Islam menjadi penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.

Kata Kunci: Ekonomi Makro Islam; Kebijakan Fiskal; Kelangkaan Sumber Daya; Maqashid Syariah; Rekonstruksi Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia karena hampir seluruh aktivitas individu tidak terlepas dari upaya pemenuhan kebutuhan. Dalam ranah akademik, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara agregat seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi. Namun, pendekatan ekonomi makro dalam sistem konvensional cenderung menitikberatkan pada rasionalitas dan kepentingan individu semata, tanpa memperhatikan dimensi moral dan spiritual, yang pada akhirnya memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan serta kesejahteraan masyarakat (Irawan, Maulana, & Hayati, 2025).

Sebagai respon terhadap kelemahan sistem konvensional tersebut, ekonomi Islam hadir menawarkan pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah, etika, serta

keadilan dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kebersamaan (ta’awun) menjadi landasan utama dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan. Tujuan akhir dari ekonomi makro Islam bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan pencapaian falah—yakni kesejahteraan hakiki yang mencakup dimensi material dan spiritual. Di sinilah pentingnya rekonstruksi konseptual terhadap ekonomi makro Islam agar mampu memberikan solusi sistemik yang menjawab tantangan global kontemporer (Irawan et al., 2025).

Salah satu instrumen kunci dalam sistem ekonomi makro adalah kebijakan fiskal. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal bukan hanya alat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan distribusi kekayaan yang adil serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pemerintah dalam sistem Islam memegang peranan sentral dalam pengelolaan sumber daya dan penerapan prinsip maqashid syariah demi kemaslahatan umat. Kebijakan fiskal Islam tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi aspek spiritual dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Miskiyah, Zunaidi, Almustofa, & Suhardi, 2022).

Selain tantangan dalam tataran normatif dan kebijakan, ekonomi makro Islam juga dihadapkan pada persoalan kelangkaan sumber daya. Dalam perspektif Islam, kelangkaan bukan hanya masalah keterbatasan fisik, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak berlandaskan nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab sosial. Ketimpangan distribusi dan eksploitasi sumber daya yang tidak adil menjadi penghambat utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Oleh karena itu, analisis atas kelangkaan dalam ekonomi makro Islam menjadi penting untuk memahami sejauh mana keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi (Amsari, Sahla, Abd Majid, & Afandi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap ekonomi makro Islam melalui pendekatan konseptual yang komprehensif, mengkaji peran strategis kebijakan fiskal dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial, serta menganalisis dampak kelangkaan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang tidak hanya responsif terhadap tantangan kontemporer, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data utama diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan kuat dengan tema ekonomi makro Islam, khususnya dalam kerangka rekonstruksi konseptual, kebijakan fiskal, dan isu kelangkaan sumber daya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel pada basis data seperti *Google Scholar* dan *Open Knowledge Repository*, dengan kriteria seleksi yang mempertimbangkan relevansi tema, kualitas publikasi, serta tahun terbit dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Setiap sumber dianalisis secara mendalam untuk menggali konsep, pendekatan kebijakan, serta perspektif strategis yang ditawarkan masing-masing studi. Proses analisis dilakukan dengan teknik tematik, yakni mengelompokkan isi dan gagasan utama dari tiap literatur berdasarkan pola dan isu yang berulang. Hasil analisis ini kemudian dirangkai secara logis dalam bentuk narasi ilmiah yang utuh, untuk disajikan sebagai sintesis literatur. Temuan-temuan dari kajian ini menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan serta menyusun rekomendasi yang relevan dengan rekonstruksi ekonomi makro Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro

1) Islam Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW

Dalam kerangka ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi syariah yang bertujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Berdasarkan kajian dari Miskiyah et al. (2022), kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW menunjukkan ciri khas tersendiri yang berbeda dari sistem fiskal konvensional. Karakteristik kebijakan fiskal pada masa Rasulullah antara lain:

- a. Sumber Pendapatan Negara Berbasis Syariah Sumber pendapatan negara terdiri dari zakat, kharaj (pajak atas tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), fai' (rampasan tanpa peperangan), ghanimah (harta rampasan perang), dan usyur (pajak perdagangan internasional). Zakat menjadi instrumen utama karena merupakan kewajiban agama yang memiliki dimensi spiritual dan ekonomi. Berbeda dari pajak konvensional, zakat bersifat tetap, jelas kadarnya, dan penggunaannya diarahkan untuk kelompok mustahiq (penerima zakat) sesuai Al-Qur'an (QS At-Taubah: 60).
- b. Distribusi Pendapatan yang Berkeadilan Rasulullah SAW menerapkan sistem distribusi kekayaan yang adil. Beliau menyalurkan dana-dana dari Baitul Mal kepada golongan

yang berhak tanpa penumpukan kekayaan pada satu golongan saja. Hal ini selaras dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan tercapainya keadilan ekonomi.

- c. Penggunaan Anggaran untuk Kesejahteraan Umum Belanja negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur, bantuan kepada fakir miskin, serta pembiayaan jihad dan pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam tidak bertujuan pada surplus atau defisit anggaran semata, melainkan kepada pencapaian maslahat umum.
- d. Sistem Perbendaharaan Negara: Baitul Mal Baitul Mal merupakan institusi keuangan negara pada masa Rasulullah SAW yang mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Meskipun pada awalnya belum terstruktur secara kelembagaan, pengelolaan Baitul Mal tetap transparan dan akuntabel, berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.

Tabel 1. Sumber Penerimaan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW.

No	Jenis Penerimaan	Keterangan
1	Zakat	Kewajiban umat Islam; digunakan untuk 8 asnaf
2	Jizyah	Pajak untuk non-Muslim sebagai imbalan perlindungan negara
3	Kharaj	Pajak atas tanah yang dikelola oleh non-Muslim atau Muslim
4	Ghanimah	Harta rampasan perang; 1/5 untuk negara, sisanya untuk pasukan
5	Fai'	Harta musuh yang diperoleh tanpa perang
6	Usyur	Pajak atas pedagang asing yang masuk wilayah Islam

2) Implikasi Kebijakan Fiskal Rasulullah dalam Konteks Kontemporer

Model kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dapat direkonstruksi dalam konteks negara modern dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Optimalisasi zakat sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat adil dan bersih.
- b. Penyusunan APBN yang berpihak pada masyarakat miskin dan sektor produktif.
- c. Pembentukan institusi pengelola dana publik yang transparan dan berbasis nilai-nilai syariah.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan sistem yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern memerlukan political will dan dukungan kelembagaan yang kuat, agar dapat menciptakan sistem fiskal yang adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Tantangan Kelangkaan Sumber Daya dalam Rekonstruksi Ekonomi Makro Islam

Dalam konteks rekonstruksi ekonomi makro Islam, tantangan kelangkaan sumber daya memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknokratik tetapi juga teologis dan etis. Perspektif Islam memandang sumber daya sebagai amanah (*trusteeship*), bukan sekadar komoditas produksi. Oleh karena itu, kelangkaan tidak hanya dilihat sebagai ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, melainkan sebagai akibat dari kegagalan moral dan kelemahan sistemik dalam distribusi, produksi, dan konsumsi.

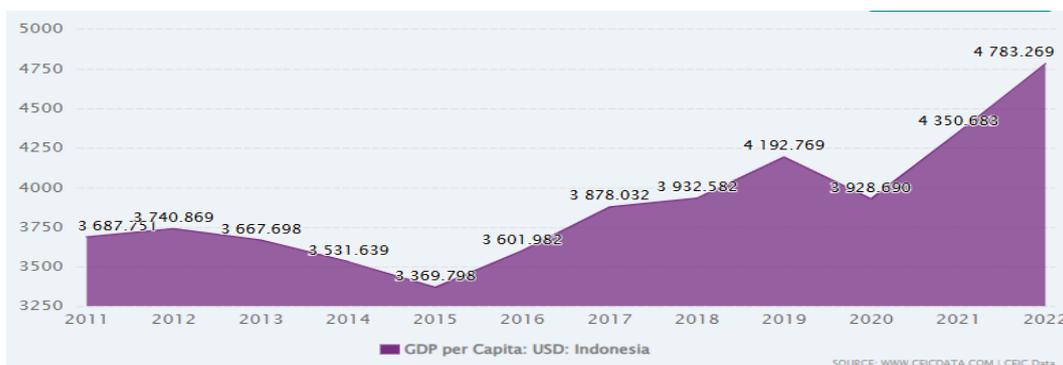
1. Krisis Tenaga Kerja Terampil dan Kesenjangan Partisipasi

Amsari et al. (2024) menyoroti kelangkaan tenaga kerja terampil sebagai hambatan makroekonomi utama. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pekerja secara agregat, kualitas tenaga kerja belum mampu mengimbangi kebutuhan sektor strategis yang padat keterampilan (*skill-intensive*). Akibatnya, angka pengangguran terbuka tetap tinggi dan menciptakan tekanan fiskal serta sosial, terutama dalam bentuk beban subsidi, penurunan produktivitas, dan degradasi daya beli.

Secara ekonomi makro Islam, ini menunjukkan lemahnya *iqtishad al-tawzi'* (distribusi tenaga kerja) dan *kasb halal* (pendapatan yang diperoleh secara sah), yang secara langsung bertentangan dengan maqashid syariah dalam menjaga harta dan kehidupan (*hifz al-māl wa al-nafs*). Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam sistem Islam harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran struktural melalui pelatihan berbasis kompetensi dan dukungan fiskal bagi industri padat karya halal.

2. Distorsi PDB dan Ketergantungan pada Sumber Daya Tak Terbarukan

Konsep PDB konvensional yang digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi tidak mengindahkan prinsip keberlanjutan (*istidamah*). Dalam hal ini, Amsari et al. (2024) menekankan bahwa PDB Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh eksploitasi sumber daya tak terbarukan seperti minyak, gas, dan batubara, yang dalam jangka panjang tidak dapat menjamin keseimbangan ekologis maupun keberlanjutan generasional.



Gambar diagram 1. GDP per Capita: USD: Indonesia

Grafik pertumbuhan PDB per kapita Indonesia dari tahun 2011 hingga 2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dari USD 3.687 pada tahun 2011 menjadi USD 4.783 pada tahun 2022, meskipun terdapat fluktuasi, terutama penurunan pada tahun 2015 dan 2020 yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak penurunan harga komoditas global dan pandemi COVID-19. Kenaikan signifikan pasca-2020 mencerminkan pemulihan ekonomi nasional, namun hal ini juga menunjukkan potensi distorsi dalam pengukuran PDB jika hanya berfokus pada angka nominal tanpa memperhitungkan ketimpangan distribusi, kerusakan lingkungan, serta ketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan yang ideal seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan angka PDB, tetapi juga dari aspek keadilan distribusi, keberlanjutan, dan keberkahan ekonomi yang tercermin dalam kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Dalam kerangka Islam, sumber daya tersebut bukanlah milik eksklusif generasi sekarang, melainkan bagian dari kapital kolektif umat manusia lintas zaman. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarukan harus dibarengi dengan *substitusi kapital alternatif* (seperti investasi dalam energi terbarukan) agar neraca keadilan antargenerasi dapat terjaga. Penyesuaian PDB menurut Askari et al. (2017) diperlukan dengan mengecualikan aktivitas yang haram, memperhitungkan eksternalitas negatif, dan mengklasifikasikan SDA habis pakai sebagai penyusutan kapital.

3. Ketimpangan Distribusi dan Kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional

Ekonomi makro konvensional gagal menciptakan keadilan distributif akibat dominasi paradigma kapitalistik yang berorientasi pada pertumbuhan absolut. Amsari et al. (2024) dan Annam (2016) menilai bahwa orientasi terhadap efisiensi dan akumulasi telah menciptakan dikotomi antara individu, masyarakat, dan negara, serta memunculkan ketimpangan struktural.

Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pada *ta'awun* (kerjasama), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *'adl* (keadilan). Instrumen fiskal seperti zakat, infak, dan larangan penimbunan (*ihthikar*) merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat.

4. Eksploitasi Sumber Daya dan Etika Ekologis Islam

Manusia sebagai khalifah fil ardh memiliki mandat untuk menjaga bumi, bukan mengeksploitasinya secara destruktif. QS. Al-Jatsiyah: 13 dan tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah disediakan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk dimonopoli atau dirusak. Sun dan Teichert (2022) mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan dan eksploitasi sumber daya akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup umat manusia.

Dalam ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan). Oleh sebab itu, pendekatan fiskal Islam harus menginternalisasi biaya lingkungan (*environmental cost internalization*) dan mengembangkan insentif fiskal bagi inovasi hijau (*green fiscal policy*).

5. Redefinisi Kesejahteraan dan Tujuan Ekonomi

Kesejahteraan (*falah*) dalam ekonomi Islam melampaui materialisme. Ia mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekologis, di mana keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani menjadi titik krusial. Amsari et al. (2024) menekankan bahwa ukuran kesejahteraan dalam kerangka Islam tidak bisa semata-mata menggunakan indikator ekonomi konvensional seperti PDB, namun harus mencakup distribusi kekayaan, indeks kebahagiaan, kualitas hidup, serta tingkat kesetaraan dan keadilan sosial.

Islam memandang bahwa manusia adalah subjek utama ekonomi, bukan sekadar alat produksi. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi harus dinilai dari keberdayaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal, bermartabat, dan berkelanjutan.

C. Pendekatan Konseptual Kebijakan Fiskal dalam Rekonstruksi Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam bukan sekadar kajian terhadap variabel ekonomi agregat seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, tetapi merupakan bagian integral dari sistem kehidupan menyeluruh (*syumuliyah*) yang berakar pada nilai-nilai syariah. Dalam pendekatan ini, kebijakan fiskal Islam bukan sekadar alat stabilisasi ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk mencapai tujuan utama syariah—yakni *falah*, kesejahteraan dunia dan akhirat secara holistik (Irawan, Maulana, & Hayati, 2025).

1. Fondasi Nilai: Moral, Sosial, dan Spiritualitas dalam Kebijakan Fiskal Islam

Rekonstruksi ekonomi makro Islam harus dimulai dari redefinisi fondasi teoretisnya. Prinsip-prinsip seperti *al-'adl* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), dan tanggung jawab sosial merupakan landasan normatif dari kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keberpihakan terhadap kelompok rentan. Tidak seperti sistem konvensional yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan, sistem Islam memberikan perhatian besar terhadap dimensi etika dalam pengelolaan anggaran dan distribusi kekayaan.

Larangan terhadap riba dan gharar menegaskan keunikan pendekatan Islam dalam menyusun kebijakan fiskal. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak hanya eksploitatif tetapi juga merusak keadilan distribusi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mendorong kolaborasi produktif

antara pemilik modal dan pelaku usaha. Hal ini menciptakan pola fiskal yang inklusif dan partisipatif (Irawan et al., 2025).

2. Zakat dan Baitul Mal sebagai Instrumen Fiskal Utama

Salah satu elemen utama kebijakan fiskal Islam adalah keberadaan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan peran institusional dari baitul mal. Zakat, secara konseptual, bukan hanya ibadah, tetapi juga alat fiskal dengan fungsi redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam kerangka makro, zakat dapat dioptimalkan untuk membiayai sektor produktif seperti UMKM, pendidikan kejuruan, dan pelatihan tenaga kerja, yang berkontribusi langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan sosial.

Baitul mal, dalam sejarah Islam, berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola dana publik berbasis syariah. Irawan et al. (2025) menyebut bahwa baitul mal dapat dialokasikan untuk pembiayaan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Artinya, baitul mal bukan hanya simbol historis, tetapi institusi fiskal yang relevan dalam menjawab tantangan kelangkaan sumber daya manusia dan alam, selama dikelola secara profesional dan akuntabel.

3. Integrasi Kebijakan Fiskal dan Maqashid Syariah

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang netral terhadap nilai, ekonomi makro Islam mengintegrasikan kebijakan fiskal dalam kerangka maqashid syariah, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kebijakan fiskal harus berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan manusia secara menyeluruh.

Misalnya, pengeluaran negara harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan (*hifz al-'aql*) dan layanan kesehatan (*hifz al-nafs*), bukan hanya sebagai belanja rutin tetapi sebagai investasi sosial. Demikian pula, kebijakan subsidi, insentif, dan pajak (*kharaj*, *jizyah*, *'usyur*) harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

4. Relevansi dalam Konteks Kelangkaan Sumber Daya

Rekonstruksi ekonomi makro Islam sangat relevan di tengah krisis kelangkaan sumber daya saat ini. Kelangkaan dalam pandangan Islam bukan semata akibat dari keterbatasan fisik, tetapi cermin dari kegagalan sistem dalam mendistribusikan dan mengelola sumber daya secara adil. Oleh sebab itu, konsep *amanah* dalam Islam menuntut kebijakan fiskal yang menjamin alokasi sumber daya secara efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Irawan et al. (2025) menegaskan bahwa ekonomi Islam memberikan solusi struktural atas krisis global yang diakibatkan oleh spekulasi, rente, dan ketimpangan sistemik. Dengan pendekatan yang etis dan kolektif, sistem ini menawarkan stabilitas jangka panjang yang tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya tak terbarukan.

5. Menuju Sistem Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Implementasi konsep fiskal Islam di era modern membuka ruang bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Negara memiliki peran sentral sebagai regulator, distributor, dan fasilitator dalam ekonomi Islam. Tujuannya adalah menciptakan struktur fiskal yang memihak kepada masyarakat bawah, memberdayakan umat, dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Sebagaimana disebutkan oleh Irawan et al. (2025), ekonomi makro Islam tidak hanya menawarkan alternatif, tetapi juga menjadi kritik normatif terhadap kegagalan sistem kapitalisme global. Dengan menempatkan moralitas sebagai inti dari kebijakan fiskal, rekonstruksi ekonomi Islam tidak lagi utopis, melainkan semakin relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Rekonstruksi ekonomi makro Islam melalui pendekatan kebijakan fiskal dan tanggapan terhadap kelangkaan sumber daya menawarkan solusi struktural yang bersumber dari nilai-nilai syariah dan maqashid syariah. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW menekankan keadilan distribusi, pengelolaan sumber daya yang beretika, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan umum, serta menjadikan zakat dan baitul mal sebagai instrumen utama dalam pembiayaan negara. Tantangan kontemporer seperti krisis tenaga kerja terampil, eksploitasi sumber daya tak terbarukan, dan ketimpangan distribusi menuntut pendekatan konseptual baru yang menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi dan sumber daya sebagai amanah. Ekonomi makro Islam menolak paradigma pertumbuhan eksploitatif dan menawarkan sistem yang holistik, etis, dan berorientasi jangka panjang demi keberlanjutan dan keadilan antargenerasi.

Saran Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menyusun kebijakan fiskal, khususnya dengan mengintegrasikan zakat ke dalam sistem keuangan negara, memperkuat peran baitul mal sebagai lembaga fiskal strategis, serta merancang APBN yang berpihak pada kelompok miskin dan sektor produktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amsari, S., Sahla, H., Abd Majid, M. S., & Afandi, A. (2024). Kelangkaan dalam ekonomi makro Islam: Analisis dampak keterbatasan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 277–285.
- Dimiyati, A. (2021). Konsep rasionalitas islami dan implikasinya terhadap pengembangan studi ekonomi Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 137–162.
- Irawan, R. M., Maulana, R. J., & Hayati, S. (2025). Analisis konseptual terhadap fondasi ekonomi makro Islam: Studi literatur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1055–1062.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif bagi krisis ekonomi global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 133–152.
- Latif, A. (2014). Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam. *Diktum*, 153–169.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Istithmar*, 6(1), 69–83.
- Muhammad, D., & Muhammad, H. (2018). *Pengantar ekonomi: Teori dan aplikasi*.